



Malioboro akan diurus badan khusus

Oleh Galih Eko Kurniawan
 HARIAN JOGJA

**UMBULHARJO: Perten-
 gahan tahun ini, Pemerintah
 Kota (Pemkot) Jogja segera
 merampungkan pembentu-
 kan sebuah badan otoritas
 semacam Unit Pelaksana
 Teknis (UPT) untuk menan-
 gani kawasan Malioboro.**

Karena itu, enam instansi daerah di Kota, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Ketertiban (Dintib), Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) diharapkan segera menyamakan persepsinya guna membentuk badan itu.

Wakil Walikota (Wawali) Kota Jogja Haryadi Suyuti menambahkan, badan itu nantinya akan menjadi penanggung jawab tunggal penataan kawasan Malioboro yang isinya perwakilan dari masing-masing enam instansi daerah tadi.

"Sebab, enam instansi daerah sekarang ini masih memakai kebi-

jakannya masing-masing dalam menata Malioboro, sehingga kesan-nya simpang siur dan tidak fokus. Tidak salah bila muncul anggapan Pemkot tidak serius menangani Malioboro. Padahal, kami benar-benar serius menangani kawasan itu," kata Haryadi kepada wartawan di Gedung DPRD Jogja, Senin (30/3).

Dalam pembentukan badan otorita ini nanti, peranan pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Malioboro sekarang ini tetap akan dilibatkan, mengingat posisi pelaku-pelaku ekonomi di Malioboro berada di lini depan penataan kawasanannya nanti.

Karena itu, imbuh Haryadi, para pelaku ekonomi seperti tukang becak, pedagang, kusir andong, ataupun tukang parkir juga perlu mengagendakan pertemuan secara mandiri, untuk ikut membantu penataan Malioboro, dan meminimalisasi terjadinya konflik sosial.

"Seperti yang dilakukan tukang becak dan pedagang pekan lalu. Dengan inisiatif sendiri, mereka mengecat garis batas area pedagang dan tukang becak. Nah, hal-hal semacam itulah yang membantu

penataan Malioboro," kata Haryadi.

Tambah dia, selain melibatkan enam instansi daerah, penataan Malioboro dalam satu badan juga akan melibatkan tiga kecamatan, yakni Gedongtengen, Ngampilan, dan Danurejan. Hal ini karena wilayah-wilayah tersebut masuk program penataan Malioboro.



Haryadi Suyuti

Sementara itu, Kepala Dishub Jogja Agus Budi-yono mengakui saat ini Pemkot bersama enam instansi daerah memang sedang membahas draf pembentukan satu badan

khusus itu. Terakhir, agenda pertemuan membahas mengenai tugas-tugas pokok masing-masing anggota badan khusus tersebut. "Salah satunya, bila terjadi kejadian pelanggaran hukum, peraturan yang digunakan ya yang berkaitan dengan anggota-anggota badan itu, misalnya saja menggunakan peraturan milik Dishub," ungkapnya.

Dalam agendanya, Selasa (31/3) pukul 15.00 WIB ini Wawali dijadwalkan bertemu dengan Paguyuban Kawasan Malioboro di Ruang Utama Bawah Balaikota. Pertemuan itu diperkirakan juga akan membahas masalah penataan wilayah andalan Jogja tersebut.

1. itur
 2. Wakil Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Pemukiman dan Prasarana			
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			
5. Dinas Ketertiban			
6. Badan Perencanaan Pembangunan			
7. Badan Lingkungan Hidup			

